

DAFTAR ISI

1. Penguatan Perilaku Individu Menuju Perubahan Dalam Memacu Keefektifan Organisasi
HENGKY V.R. PATTIMUKAY _____ **1-20**
2. Pengaruh Kompetensi Komunikasi, Motivasi, dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
HENDRY SELANNO _____ **21-42**
3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Badan Saniri Ohoi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi pada Ohoi Debut Kecamatan Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara
LUSIANA RENTANUBUN _____ **43-59**
4. Budaya Kerja Birokrasi di Kantor Walikota Tidore Kepulauan
ISRA MUKSIN _____ **60-70**
5. Modal Sosial dan Pembangunan
(Studi Masyarakat Waihatu Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat)
ISHAKA LALIHUN _____ **71-92**
6. Peranan Siaran Pedesaan RRI Ternate dalam Meningkatkan Produksi Kopro Di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara
BAHRUDIN HASAN _____ **93-105**
7. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Program Kesehatan Lingkungan di Rw 14 Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon
ILYAS IBRAHIM _____ **106-117**
8. Strategi Pencitraan Dinas Penerangan TNI AU dalam Kasus Kecelakaan Pesawat Militer di Indonesia
RIRIN INDRASWARI _____ **118-130**
9. Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Negeri Mamala
NURAINY LATUCONSINA _____ **131-140**
10. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI HUNIMUA OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI MALUKU
HEIN EDUARD SIMATAUW _____ **141-151**

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI NEGERI MAMALA

Oleh

NURAINI LATUCONSINA¹

Abstrak

Penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban pemerintah yang harus dilakukan sebagai pemenuhan atau wujud dari amanat rakyat. Dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 disebut bahwa. "Pemerintah Negara Indonesia merdeka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. " Pernyataan ini menjadi cita-cita yang bulat dan semangat bangsa yang dinyatakan dalam sila ke-lima Pancasila, yaitu mewujudkan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan yang landasan strukturalnya terumuskan secara jelas dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (3).

Kata Kunci: Kebijakan, penanggulangan kemiskinan

A. Pendahuluan

Penanggulangan kemiskinan memiliki konteks yang luas dan menjadi bagian serta unsur penting dari pembangunan nasional. Kebijakannya mengarah pada usaha meminimalkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat dan menempatkannya menjadi bagian integral dari sasaran jangka panjang pembangunan nasional. Usaha untuk menanggulangi kemiskinan tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu mengembangkan kesempatan ekonomi bagi kelompok miskin, memberdayakan kemampuan kelompok penduduk miskin, dan meningkatkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). (Anderson, James E., 2004, 136)

B. Kebijakan menanggulangi kemiskinan dilengkapi dengan peraturan-perundangan untuk memberi arah dan menjamin kepastian tercapainya tujuan pelaksanaan program. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang

¹ Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Pattimura, Ambon

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang antara lain memuat program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu legitimasi tekad pemerintah pusat untuk melaksanakan program tersebut ke daerah-daerah di seluruh Indonesia melalui otonomi daerah.

- C. Otonomi daerah diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah; pelaksanaannya bersifat langsung, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebagai penyelenggara Negara di daerah memiliki otonomi yang luas dan utuh. Secara implicit dan eksplisit pemerintah daerah bertanggung jawab dan juga aktif melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan. Bidang-bidang pembangunan yang wajib dilaksanakan termasuk pengentasan kemiskinan; seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi (pertanian, perdagangan dan lain-lain). (Dye, R. Thomas, 1987)
- D. Pelaksanaan kebijakan nasional untuk penanggulangan kemiskinan seringkali terkendala oleh Peraturan Daerah; karena substansinya tidak sinkron. Sementara itu hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak langsung berdasarkan pada sistem birokrasi administrasi yang hirarkhis seperti pada masa lalu. Dengan demikian, produk hukum dari pusat yang melandasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tidak menjadi acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang sama. Sekalipun visi dan misi program tersebut memiliki makna yang signifikan bagi kebutuhan masyarakat miskin di daerah namun kebijakan tersebut tidak bisa mulus dilaksanakan di daerah.

B. Pembahasan

Upaya lain peningkatan kesejahteraan adalah melalui peningkatan akses pada pemeliharaan kesehatan, dan pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar 9 tahun. Keduanya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Sasaran pembangunan yang berorientasi pada wilayah tertinggal adalah peningkatan dan pembangunan infrastruktur pedesaan. (Badan Statistik, 2006, 1)

Relevansinya dengan pemberdayaan dalam kepustakaan tergambarkan bahwa konsep pemberdayaan (empowermen) pada mulanya ditekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan, kepada individu organisasi atau masyarakat agar jadi lebih bergairah. Secara lebih luas menurut Dadang Solihin (2007 : 56), pemberdayaan sering disamakan dengan pengalihan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. Dalam hubungan dengan penelitian ini maka Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Negeri Mamala yang dilaksanakan melalui Kebijakan Pemerintah melalui penyediaan bantuan dana pemberdayaan kelompok nelayan yang ada di desa ini.

1. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pembangunan berkelanjutan merupakan pencerminan dari pemahaman yang lebih dari fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh unsur-unsur lingkungan hidup yang merupakan matriks yang terdiri dari sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Selanjutnya pengertian pembangunan berkelanjutan juga mampu mengandung pemahaman berkelanjutan dari aspek ekonomi maupun finansial yang mampu melakukan pemeliharaan terhadap setiap kapital secara efisien dari investasi. Pemahaman ini harus juga dapat memelihara integritas ekosistem, daya dukung dan konservasi

sumber daya alam dengan mengikutsertakan masyarakat komunal yang hidupnya telah menyatu dengan alam. Oleh karena itu hak-hak harus diakui dan dijamin Negara, agar terciptanya partisipasi dalam pemeliharaan kelestarian sumber daya alam yang menjadi sumber nafkah yang mendukung kehidupan masyarakat (Nontji, 1987 ; 19).

Pembangunan wilayah pesisir adalah pembangunan seluruh wilayah perairan Indonesia dengan segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan seluruh Bangsa Indonesia. Pemahaman tentang pembangunan menjadi penting disebabkan karena selama pembangunan ini, pemerintah kurang memperhatikan keberlanjutan program dan hasil pembangunan yang selanjutnya memberikan ketimpangan yang cukup besar dalam masyarakat dan kerusakan sumber daya alam (natural resources). Menurut Brundtland Commission, Report of Our Common Future (1987) pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengabaikan kemampuan dari generasi akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dalam Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (a), (2001:13).

Berbagai program pemerintah dalam rangka pemberdayaan yang bersifat parsial dan sektoral yang pernah dan sedang dilakukan, sering menghadapi berbagai kondisi yang kurang menguntungkan seperti salah sasaran, menumbuhkan ketergantungan masyarakat pada bantuan luar dan pemerintah sehingga berimplikasi pada melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan dan lain-lain). Lemahnya kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang

semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Melemahnya kondisi kapital sosial kiranya turut dipengaruhi oleh kebijakan dan tindakan dari pengelola program pemberdayaan yang tidak adil dan tidak transparan serta adanya pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak berorientasi kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal yang demikian akan menimbulkan kecurigaan, kebocoran dan stereotype di masyarakat sebagai akibat ketidakadilan tersebut. Kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini dapat terjadi pada situasi tatanan masyarakat yang belum madani, yang salah satu indikasinya dapat dilihat dari kondisi kelembagaan masyarakat yang belum berdaya, yang tidak berorientasi pada keadilan, tidak dikelola dengan jujur serta terbuka dan tidak berpihak serta memperjuangkan kepentingan masyarakat lemah. (Hidayat, M.M. & Surochiem. 2001), disarikan dari (<http://www.ipb.falsafahsains.co.id>)

Menurut Prijono dalam Putra (2001 : 97) mengatakan bahwa dalam spektrum yang lebih luas memberdayakan rakyat (masyarakat) mengandung makna mengembangkan, memandirikan menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapis bawah terhadap, kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang. Disamping itu mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah,

Kelompok-kelompok kerja masyarakat yang belum berdaya tersebut pada dasarnya disebabkan oleh karakteristik lembaga masyarakat yang ada di masyarakat cenderung tidak mengakar dan tidak representative. Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidak mengakar, tidak representatif dan tidak dapat dipercaya

tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi perilaku/sikap masyarakat yang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada akhirnya mendorong sikap skeptisme, masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran.

Gambaran lembaga masyarakat seperti dimaksud di atas hanya akan dicapai apabila orang-orang yang diberi amanat sebagai pemimpin masyarakat tersebut merupakan kumpulan dari orang-orang yang peduli, memiliki komitmen kuat, ikhlas, relawan dan jujur serta mau berkorban untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Tentu saja hal ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena upaya-upaya membangun kepedulian, kerelawanan, komitmen tersebut pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan perilaku masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat nelayan sebenarnya merupakan upaya untuk mengatualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat nelayan. Jadi pemberdayaan masyarakat nelayan ditekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri. Pendekatan sedemikian diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek (aktor yang menentukan hidupnya sendiri).

1. Kesimpulan

Setelah dianalisis data penelitian lapangan dalam kerangka pemecahan masalah pokok dalam penelitian ini maka berikut ini akan disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pelaksanaan penyeleksian kelayakan kelompok-kelompok nelayan di desa ini yang merupakan kelompok sasaran pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terutama terhadap kelompok nelayan yang ada, dilakukan melalui tahapan identifikasi permasalahan mereka serta identifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pesisir terutama kelompok nelayan telah dilaksanakan sesuai tujuan pelaksanaan program dimaksud, akan tetapi intensitas pelaksanaannya masih kurang berjalan dengan baik. Kenyataan ini terlihat dari besaran prosentase jawaban responden dimana rata-ratanya berada pada kisaran 60 %. Bila identifikasi permasalahan masyarakat pesisir tidak baik pelaksanaannya maka tidak tertutup kemungkinan, akan ada kelompok nelayan yang tidak layak dan tidak sesuai persyaratan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan bantuan program pemberdayaan masyarakat ini sehingga memungkinkan pelaksanaan program tersebut menjadi jauh dari tujuan yang ingin dicapai.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan kelompok-kelompok nelayan di daerah pedesaan, terdapat sejumlah harapan yang kiranya patut dibanggakan terutama terkait dengan keinginan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat atau mengurangi angka kemiskinan masyarakat terutama mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Akan tetapi bila menyimak hasil pelaksanaan program ini secara

sepintas dan menyeluruh, kiranya harapan tersebut tidak akan terwujud karena ketidakjujuran para penanggungjawab di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, S., 1995, Adaptasi Ekologi masyarakat di Wilayah Pesisir Makalah Kursus Pelatihan Integrated Coastal Zone Management (Angkatan I), Bogor 3 April - 9 September 1996, Kerjasama ADB, Bakosurtanal dan PK SPL IPB.
- Anwar, A., 1997, Masalah Modasl Dasar (Human Capital) dalam Hubungan Mengatasi Kesenjangan Gender dan Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Makalah Acuan Penelitian Human Capital Program Studi PWD PPS IPB Bogor.
- Ayob, A.M., 1981, Teori Makro Ekonomi Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.
- Agus Dwiyanto, 2000. Pendekatan pemberdayaan dalam pembangunan komunitas, paperjakarta.
- Anderson, James E., 2004, Public Policy Making, New York, Praeger Publishers. Spetember 2004, <http://kebajikan pemerintah.co.id>
- Andik Nurcahyo, Metode Penelitian Kualitatif.. Jakarta , 2010
- Bungin, Burhan. 1987. Penelitian Kualitatif, komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Kencana Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Mekanisme Pendistribusian Kartu Konpensasi BBM, www.papua.go.id, 22 Juli 2006
- Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA), 2000, Laporan akhir Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Nelayan Tahun Anggaran 2000, Jawa Tengah.
- Carner, G., 1984, Kelangsungan Hidup Saling Ketergantungan dan Persaingan di Kalangan Kaum Miskin Philipina dan Pembangunan Berdimensi Kerakyatan: Penyunting Korten dan Sjahrir. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Dye, R. Thomas, 1987, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs Inc, New Jersey, Prentice Hall 2, <http://kebajikan pemerintah.co.id>
- Dahuri, R., 1996, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2001, Makalah Stadium General. Program Studi Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan, IPB, Bogor.

- Damanhuri, D. dan L. Arianto, 1995, Dimensi Sosial Ekonomi dalam Kerangka Pembangunan Masyarakat Pesisir, Makalah Pertemuan Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai, 2000 & 2001, Laporan PEMP Tahun Anggaran 2001, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, 2004 & 2005, Laporan Akhir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Maluku Tahun 2004.
- Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP, 2002, Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) 2002.
- Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP, 2001 & 2004, a. Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Dirjen P3K, Jakarta.
- Dipokusumo, B., 1999, Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Pemukiman Lahan kering di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tesis Program Pascasarjana IPB.
- Dadang Solihin, Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal, Jakarta, 2007
- Faisal, Sanafiah. Format-format Penelitian Sosal, P.T Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1989
- Fadilah, Putra, 2001, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fahrudin, A., 1997, Metode Penelitian dan analisis Data Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir, Pelatihan Pengelolaan Hutan Mangrove, PKSPL-IPB, Bogor.
- Gray, Clive, Payaman Simajuntak, Lien k. Sabur, P.F.L. Maspaitella, R.C.G. Varley, 1997, Pengantar Evaluasi Proyek, Jakarta.
- Gunawan S. 1996 Membangaun perekonomian rakyat. Ekonomi pembangunan. IDEA dan pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Harry, Hikmat, 2001, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Jones, Charles O , 1987, An Introduction to Study of Public Policy, Massachussts, Duxbury Press. <http://kebijakan pemerintah.co.id>
- Kepres Nomor 124 Tahun 2001 oleh Kepres Nomor 8 Tahun 2002 yang kemudian dirubag lagi oleh Kepres Nomor 34 Tahun 2002, hanyalah menyangkut subtansi Pasal 3 yang mengatur tentang keanggotaan Komite

- Penanggulangan Kemiskinan, Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan, Cet. Ke-V, Jakarta, KPK-RI, 2002
- Kamaluddin, L.M., 1994, Strategi Penyiapan dan Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia pada Pembangunan Agrobisnis Perikanan Indonesia, Institut Pengembangan manajemen Indonesia, makalah pada Seminar Sehari Himpunan Sosial Ekonomi Perikanan, IPB, Bogor. (tidak dipublikasikan).
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Pustaka Cidesinde, Yogyakarta.
- ., 1996, Power and Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Khairuddin, H., 1992, Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosial Ekonomi dan Perencanaan, Liberty, Jakarta.
- Kusnadi, 2002, Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perairan, LKIS, Yogyakarta.
- Labbovitz dan hagedorn, teori, <http://www.kipemedia.org2010>,.Buku ajar kebijakan pemerintah.
- Nontji, A., 1987, Laut Nusantara, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Parianom, Bambang dan Mansyur Effendi. 1998. Paradigma, Strategi dan Langkah Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan. Surabaya : LSK.
- Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ejaan yang disempurnakan,. Balai Pustaka, Jakarta, 1982
- Remi Sutvastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto, 2002, Proverty dan Inquality in Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.